

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

*Sopiah**

Abstract: The paradigm of multiculturalism becomes an idea that is contextual enough with contemporary society today. The fundamental principles of equality, fairness, openness, recognition of difference are the principle of human values that are needed in the crush of global culture. Therefore, as a cultural movement, multiculturalism is an integral part in various cultural systems in society, for the case in education is through multicultural education. Multicultural education can be implemented in Indonesia in the form of formal, informal and non formal education by integrating multicultural values in curriculum materials, through strategies, approaches and methods of learning, learning interaction as well as the early internalization of multicultural values to students. Thus education (Islam) in Indonesia will produce nation cadres that are more tolerant, inclusive and *rahmatan lil alamin*.

Kata kunci: Multikulturalisme, Pendidikan, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Wacana pendidikan multikultural akhir-akhir ini cukup menggema di Indonesia. Indonesia dengan kondisi etnis, adat-budaya, agama yang berbeda tapi dibingkai dengan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” memang sangat berkaitan dengan paradigma multikulturalisme, dimana multikulturalisme bisa diwujudkan secara strategis melalui pendidikan multikultural baik melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal.

* *Dosen Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*

Indonesia dengan keragaman etnis, adat budaya dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan pengalaman politik kekuasaan yang sentralitas, pengawalan yang ketat terhadap isu-isu perbedaan dan keragaman yang ada pada masyarakat bangsa-negara Indonesia, cukup tertanam dalam benak masyarakat kita, maka sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam kondisi multi kondisi, multi agama dan multi kultural. Meskipun demikian seakan-akan masyarakat Indonesia kehilangan kesadaran dan kemampuan yang baik dalam melakukan *problem solving* yang berkaitan dengan isu multi agama, multi etnis dan multi kultural tersebut. Tentu saja wacana multi kultural dalam pendidikan bukan sesuatu yang sangat asing, meskipun ‘tidak semua’ lapisan melakukan pendidikan yang multikultural ini dengan ‘penuh kesadaran’, mungkin hanya secara kebetulan, mungkin melakukan dengan ala kadarnya karena memang tuntutan “kebiasaan dan kondisi” yang di hadapi sehari-hari pada kehidupan mereka, atau bahkan mungkin melakukan pendidikan tidak dengan pendidikan yang multikultural (baca meskipun sangat tidak mungkin melakukan pendidikan dengan monokultural bukan?, apalagi kalau pendidikan tersebut pendidikan di perguruan tinggi).

Multikulturalisme

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya, meskipun ada tiga istilah lain yang biasanya digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman, baik agama, ras, bahasa dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*) dan multikultural (*multicultural*). Pada dasarnya ketiga istilah tersebut mengacu pada satu hal yang sama, yaitu “ketidaktunggalan”, namun secara konseptual memiliki perbedaan diantara ketiga istilah tersebut. Pluralitas merepresentasikan adanya kemajemukan, lebih dari itu multikultural memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan itu mereka tetap sama diruang publik (Scott Lash dan Mike Featherstone, 2002: 2-6).

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Parsudi Suparlan, 2002: 1).

Wacana tentang multikulturalisme pertama muncul di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an, oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil. Gerakan ini bertujuan mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Pada waktu itu disana hanya dikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan mayoritas kulit putih yang beragama Kristen, golongan yang ada di masyarakat dikelompokkan sebagai kelompok minoritas yang memiliki hak-hak yang terbatas (Parsudi Suparlan, 2002:2-3).

Multikultural dalam Pendidikan

Gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an berimplikasi pada dunia pendidikan, maka muncullah tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang pada waktu itu masih sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnis dan keragaman budaya (James A Bank, 1989: 4-5). Sebagai sebuah paradigma multikulturalisme menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang sangat dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global. Oleh karena itu sebagai sebuah gerakan budaya, multikulturalisme merupakan bagian integral dalam berbagai sistem budaya dalam masyarakat, salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui pendidikan multikultural.

Pendidikan dalam wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (James A. Bank, 2001 : 28).

Menurut Sonia Nieto (2002: 29) Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang segala bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat dengan menerima dan mengafirmasi pluralitas yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka dan guru-guru. Menurut Sonia pendidikan multikultur harus melekat dalam

kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Jenis pendidikan ini merupakan paedagogi kritis, reflektif dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, maka pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial. Sementara itu Bikhu Parekh (2000:230) mendefinisikan pendidikan multikultur sebagai *“an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives”*.

Dari uraian di atas ada hal penting dalam diskursus multikultural dalam pendidikan yaitu identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya inheren dalam sikap pribadi atau kelompok masyarakat, dengan identitas mereka berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk interaksi antar budaya yang berbeda. Dalam pendidikan multikultur identitas diasah melalui interaksi budaya internal maupun eksternal. Dengan demikian identitas dan budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam (kurikulum) pendidikan multikultural.

Pendidikan Multikultural

Konsep pendidikan multikultural lebih dahulu dikenal dan berkembang di negara maju. seperti Amerika serikat misalnya. Didorong oleh tuntutan warga Amerika latin dan Afrika, warga pribumi dan kelompok marginal yang menuntut persamaan hak dan kesempatan dalam mengenyam pendidikan, di samping itu didorong oleh usaha komunitas profesional sebagai solusi bagi masalah pertentangan antar ras, maka dimulailah satu pendidikan yang khas, yang lebih dikenal sebagai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang dilakukan di Amerika lebih sebagai upaya melenyapkan diskriminasi ras antara kulit putih dan kulit hitam, demi integritas nasional yang mereka inginkan.

Pendidikan multikultural secara sederhana dimaksudkan sebagai satu pendidikan tentang keragaman budaya, pendidikan dengan budaya yang beragam. Menurut Muhaemin el-Ma'hady (2004: 2) pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Sementara itu Bikhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai “*an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspective*” (2000:230). Maka ada hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji multikultural dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial

James Bank menjelaskan bahwa ada lima dimensi dalam pendidikan multikultural (1993:3-24), yaitu, *pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*), yaitu bahwa sekolah adalah elemen pengentas sosial dari struktur masyarakat yang timpang ke struktur masyarakat yang berkeadilan.

Ide tentang konsep pendidikan multikultural menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasikan UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Ada sekurangnya empat pesan dalam rekomendasi tersebut (A Effendi Sanusi, 2008: 2), yaitu:

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.
2. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.
3. Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.
4. Pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik, sehingga mereka mampu membangaun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara secara lebih kokoh.

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal (2002:185-190), yaitu: *pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *weltanshaung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro, maka perlu mengoptimalkan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif, yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat* pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku maupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan berarti seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya ini diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar individu, suku, agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.

Implementasi dalam Pendidikan Islam

Di Indonesia implementasi paradigma pendidikan multikultural setidaknya menjadi salah satu perhatian, karena secara implisit dalam UU No. 20/ tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. (UU No.20/ tahun 2003 pasal 4:1 dan 2).

Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diimplementasikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. Pada pendidikan formal tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi wacana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan cara memasukan muatan

wawasan multikultural pada materi kurikulum terkait seperti agama, pendidikan kewargaan/civic education, sosiologi atau materi lain yang relevan. Disamping itu dapat diimplementasikan melalui pendekatan, metode dan model pembelajaran seperti diskusi, tugas kelompok, dan *Contextual Teaching and Learning*. Pada pendidikan non formal muatan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai multikultural pada pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan secara mandiri. Wawasan multikultural dapat diberikan kepada anak dari hal yang sederhana seperti menyadari perbedaan jenis kelamin dan gender, pengetahuan tentang bermacam adat istiadat, toleransi antara sesama anggota keluarga dan teman sepermainan dan lain-lain.

Sementara pada pendidikan nonformal wawasan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan oleh lembaga pelatihan, kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar dan majlis taklim melalui pelatihan-pelatihan, pengkajian-pengkajian dan pengajian-pengajian yang berwawasan multikultural, tidak fanatik buta pada satu faham/pengetahuan, tidak memupuk nilai-nilai primordialisme dan mono etnik. Sebaliknya pendidikan dilaksanakan dengan menekankan keterbukaan, kebersamaan, toleransi, bahkan sejak dini.

Dalam Islam pendidikan berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas hidup di muka bumi sebagai *abdullah*, yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak Allah, mengabdikan hanya kepada Allah maupun sebagai *khalifah Allah*, baik menyangkut pelaksanaan tugas ke *khalifahan* terhadap diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan tugas ke *khalifahan* terhadap alam (Muhaemin, 2004: 24). Menurut Muhaemin di antara tugas ke *khalifahan* dalam masyarakat adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong menolong dalam kebaikan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggungjawab terhadap amar makruf nahi munkar dan berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah dan lain-lain. Sementara yang berkaitan dengan tugas ke *khalifahan* yang berkaitan dengan alam di antaranya membudayakan alam, mengalami budaya dan mengislamkan kultur.

Pendidikan Islam merupakan usaha yang dilakukan dalam menggali dan mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia atau mewujudkan peserta didik menjadi *Insan Kamil*. Tidak mudah mencapai *Insan kamil*, perlu persiapan dan pembelajaran hidup yang

maksimal, dimana orang yang sudah masuk katagori *Insan Kamil*, secara manusiawi sudah sempurna, relatif sudah tidak ada problem ketuhanana dan kemanusiaan. Sudah optimal secara *hablum min Allaah wa hablun min an-nas*, atau manusia yang sudah bisa mengoptimalkan dan menggunakan *Multiple Intelegence*-nya secara seimbang dalam segala aspek kehidupan.

Karena pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan nasional, maka sesungguhnya pendidikan Islam di Indonesia-pun bisa mengimplementasikan wawasan pendidikan multikultural. Pada dasarnya Islam sudah “beragam” sejak kelahirannya, setidaknya menurut catatan sejarah. Pendidikan Islam-pun beragam, maka orang Islam tidak akan dianggap mengingkari sejarah bila mengimplementasikan pendidikan yang multikultural. Pada kenyataannya untuk mengajarkan Islam saja, seorang guru atau dosen sudah biasa mengimplementasikan wawasan multikultural. Dalam pembelajaran fiqih misalnya satu peribadatan bisa dilaksanakan secara beragam menurut keyakinan dan pemahaman (*fiqh*) yang berbeda intern umat Islam, bagaimana kita membelajarkan peserta didik secara monokultur? Toleransi beragamapun bahkan sudah terlebih dahulu diajarkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran (surat al-Kaafirun, diantaranya) dan diajarkan nabi melalui Sunnahnya (kebersamaan antara kaum Muhajirin dan Anshor, diantara sampelnya); manusia diciptkan Allah laki-laki dan perempuan dengan berbeda bangsa dan suku, supaya manusia saling mengenal (bagian dari ayat al-Quran surat An-Nisa, misalnya).

Yang sangat menarik adalah pendidikan Islam informal seperti *majlis taklim*, barangkali agak ideal kalau paradigama multikultural diimplementasikan mealui jenis pendidikan Islam semacam ini. Menurut hemat penulis pada *majlis taklim*-pun wawasan dan paradigma pendidikan multikultural dapat disampaikan, mungkin dimulai dari masalah yang sangat sederhana dan keseharian, seperti masalah toleransi beragama baik internal agama Islam maupun antar umat beragama. Kesan sementara pengajian dan pengkajian melalui *majlis taklim*, relatif kurang “multi” dan fanatik madzhab, ini tidak berarti sama sekali sulit, hanya perlu dibiasakan (*pembiasaan* bagi guru/ustadz maupun murid/santrinya) untuk mengaji dan mengkaji fiqih berbagai madzhab, mengaji dan mengkaji aqidah dari berbagai aliran, membaca alqur’an dengan *qiroah sab’ah*, mengaji dan mengakaji ilmu Islam dengan berbagai cara dari berbagai sudut pandang, semuanya dimaksudkan untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan memasukan nilai-nilai multikultural pada setiap materi bahasan maupun pendekatan pembelajaran.

Dengan demikian tidak akan ada keraguan bagi kita para pendidik Islam untuk mengimplementasikan wawasan multikultural dalam pendidikan yang kita lakukan. Dengan pendidikan multikultural Islam akan semakin inklusif tidak eksklusif, membumi tidak melangit, kontekstual tidak tekstual, dan betul-betul merupakan bagian dari perwujudan Islam sebagai *rahmatan lil a'lam*.

Simpulan

Bangsa dan masyarakat Indonesia merupakan warga dan bangsa yang multi etnis, multi ras, multi adat dan multi agama, namun demikian merupakan satu kesatuan yang berjuang menegakkan NKRI, bertahan dalam integritas bangsa dan warga Indonesia, menjunjung persatuan bangsa. Karena pengalaman yang mencekam, pengawalan dan otoritas yang khas dan ketat, sistem kekuasaan yang sentralitas, bangsa ini seakan kehilangan kemampuan untuk melakukan “*the best of problem solving*” terkait masalah multi etnis, multi agama dan budaya. Masyarakat Indonesia kehilangan kecerdasan dan kebijakannya tatkala dihadapkan pada masalah “keberagaman”, sehingga jalan perdamaian kadang tidak dijadikan solusi.

Pendidikan multikultural merupakan wacana yang relatif baru di Indonesia, terlebih bagi pendidikan Islam di Indonesia, tapi sesungguhnya nilai-nilai pendidikan multikultural sudah menjadi wawasan dan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Akar filosofis pendidikan multikultural di Indonesia tercover dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”, implisit dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan telah diajarkan terlebih dahulu dalam ajaran Alloh melalui Al-Quran dan ajaran Nabi melalui Sunnahnya. Dengan demikian pendidikan multikultural dapat dijadikan alternatif solusi untuk menjadi terapi bagi ketidakkompakan bangsa Indonesia menghadapi masalah bangsa ini secara bersama-sama, sehingga derap langkah kita semakin mantap menuju aktualisasi jati diri bangsa yang lebih merdeka cerdas dan bijak.

Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia, baik jalur pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui integrasi materi kurikulum, yang relevan, pendekatan, metode dan model pembelajaran yang mengedepankan paradigma keterbukaan, kebersamaan, toleransi dan saling menghormati berbagai perbedaan dan keragaman yang ada sebagai satu sunnatullah yang mesti berjalan.

Daftar Pustaka

- A. Bank, James (ed). 1989. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. London: Allyn and Bacon Press.
- A. Bank, James dan Cherry A. Mc Gee (ed). 2001. *Handbook of research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey Bass.
- el-Ma'hady, Muhaemin. 2004. "Multikulturalisme dan Pendidikan multikultural". <http://pendidikan.network>.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone (ed). 2002. *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication.
- Muhaemin et. all. 2004. *Paradigma Pendidikan Islam- Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Redaksi Sinar Grafika. 2003. *Undang-Undang SISDIKNAS 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, A.Effendi. 2008. "Pendidikan multikultural dan Implikasinya". <http://blog.unila.ac.id/effendisanusi>.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", *Makalah*
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.